

# **ALASAN TIONGKOK MENOLAK PEMBANGUNAN *TERMINAL HIGH ALTITUDE AREA DEFENSE (THAAD)* DI KOREA SELATAN TAHUN 2016**

Farel Akbar Bramantya  
Departemen Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga  
E-mail: farel.akbar97@gmail.com

*Perkembangan rudal balistik milik Korea Utara mendorong Korea Selatan untuk bekerja sama dengan Amerika Serikat guna merancang sebuah sistem senjata anti nuklir bernama Terminal High Altitude Area Defense (THAAD). Sistem tersebut ditujukan untuk mengantisipasi rudal balistik milik Korea Utara jika sewaktu-waktu diluncurkan menuju Korea Selatan. Menanggapi instalasi THAAD, Tiongkok kemudian menyampaikan posisi untuk menolak perancangan senjata tersebut dengan menunda kunjungan negara hingga menerapkan sanksi ekonomi terhadap Korea Selatan. Peneliti kemudian mengkaji sejumlah data bahwasannya kapabilitas senjata THAAD sebenarnya tidak dapat mengganggu kepentingan keamanan strategis Tiongkok, namun Tiongkok sendiri menolak adanya perundingan terkait dengan senjata THAAD tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan Tiongkok menolak pembangunan THAAD di Korea Selatan. Hipotesis yang dibangun ada dua. Pertama, Tiongkok mempercayai bahwa instalasi THAAD dapat mendorong adanya security dilemma antara Korea Utara dan Korea Selatan serta memberikan ruang bagi Amerika Serikat untuk memberikan pengaruh lebih di kawasan. Kedua, Tiongkok waspada dengan adanya keputusan sepihak untuk merancang THAAD, karena sejak awal Tiongkok telah mencetuskan solusi diplomasi untuk mengatasi ketegangan nuklir Korea Utara.*

**Kata-kata Kunci :** THAAD, nuklir, Tiongkok, dilema keamanan, Korea Selatan, Korea Utara, Amerika Serikat, teori transisi kekuatan

## **Pendahuluan**

Senjata nuklir merupakan alat peledak yang menghasilkan kekuatan destruktif melalui reaksi nuklir. Dengan senjata nuklir, seseorang dapat menghancurkan seluruh kota, berpotensi membunuh jutaan orang, dan membahayakan lingkungan alam serta kehidupan generasi masa depan melalui dampak jangka panjangnya (UN, 2017). Ancaman senjata nuklir aktif Korea Utara di Semenanjung Korea lalu telah menjadi isu keamanan internasional, utamanya pasca Korea Utara memutuskan untuk mengundurkan diri dari *Non-Proliferation Treaty* (NPT) di tahun 2003.

Pasca pengunduran diri tersebut, Korea Utara lalu menguji coba daya ledak senjata nuklir *Taepodong II* untuk pertama kalinya di tahun 2006, yang mana dilakukan secara berkala di tahun 2009, 2013, dua kali pada tahun 2016, dan 2017 (BBC, 2017). Selain itu, sejauh ini *North Special Report* telah melaporkan bahwa Korea Utara kini memiliki rudal balistik jarak

pendek dan menengah yang ditempatkan di seluruh negeri, termasuk 500 unit rudal *Hwasong-5* dan *Hwasong-6* dengan jangkauan 300-500 km, serta 200 unit sistem *No-dong* dengan jangkauan 1.000 km (Elleman dan Zagurek, 2016).

Menanggapi hal tersebut, Tiongkok kemudian melakukan embargo terhadap Korea Utara sesuai Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) 1718 dengan berfokus pada sektor ekonomi. Terhitung mulai September 2017, Tiongkok telah mengawasi bank-bank besar seperti *China Construction Bank*, *Bank of China*, dan *Agricultural Bank of China* guna membatasi manuver Korea Utara untuk berkooperasi dengan Tiongkok. Tak hanya itu, pada Oktober 2017, Tiongkok pula membatasi ekspor minyak sulingan serta memberhentikan impor tekstil dari Korea Utara serta ekspor batu bara, gas alam cair, dan produk-produk kondensat (*The Guardian*, 2017).

Sementara itu, guna menghindari serangan senjata nuklir yang tidak terduga, persekutuan Korea Selatan dan Amerika Serikat yang didukung oleh perusahaan swasta Amerika Serikat *Lockheed Martin* kemudian telah siaga untuk memulai perundingan yang ditujukan untuk menempatkan sebuah sistem yang dirancang untuk menembak jatuh rudal balistik jarak pendek dan menengah bernama *Terminal High Altitude Area Defense* (THAAD) pada tanggal 7 Februari 2016. Tujuannya agar Korea Selatan dapat menyerang balik rudal Korea Utara ketika mendekati target (Swaine, 2017).

Kewaspadaan Korea Selatan tentunya memiliki dasar, dikarenakan mereka ialah musuh sejak Perang Korea 1950-1953. Kedua negara memiliki kewaspadaan terhadap masing-masing pertahanan nasional. Menanggapi hal tersebut, Tiongkok lalu menolak perancangan senjata tersebut, disusul dengan sejumlah pernyataan oleh Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, bahwasannya pembangunan THAAD berlebihan. Alasan tersebut disampaikan karena minimnya teknologi nuklir Korea Utara serta kecil kemungkinan bahwa Korea Utara menyerang Korea Selatan (CNBC, 2017). Lebih lanjut, Wang Yi menyatakan sikap Tiongkok terhadap perancangan THAAD melalui pernyataan-pernyataan berikut:

“The coverage of the THAAD missile defense system, especially the monitoring scope of its X-Band radar, goes far beyond the defense need of the Korean Peninsula. It will reach deep into the hinterland of Asia, which will not only directly damage China's strategic security interests, but also do harm to the security interests of other countries in this region.” – Wang Yi, 2016

“Since President Moon Jae-in took office, he has opted for friendship and cooperation with China and the ROK side has made important public statement that the ROK will not consider additional THAAD deployment, not participate in the US missile defense network and not develop a trilateral military alliance with the US and Japan.” – Wang Yi, 2016

Tidak hanya itu, di bulan yang sama ketika Amerika Serikat dan Korea Selatan mengadakan perjanjian perancangan THAAD, Wakil Menteri Luar Negeri, Liu Zhenmin, langsung mengadakan pertemuan darurat dengan duta besar Republik Korea untuk Republik Rakyat Tiongkok, Kim Jang-soo, dan menyampaikan posisi untuk menolak perjanjian tersebut. Setelah kesepakatan tersebut diumumkan, Kementerian Pertahanan Nasional Tiongkok sontak menunda dialog pertahanan tingkat tinggi dengan Korea Selatan dan menunda kunjungan menteri pertahanan Korea Selatan ke Tiongkok (Lee, 2016). Sebagai respon atas THAAD pula, pemerintah Tiongkok juga tidak mengirim pejabat tingkat tinggi sebagai tamu utama untuk menghadiri resepsi Hari Nasional Kedubes Korea Selatan pada tahun 2016 (Swaine, 2017). Tiongkok lalu memperkuat kampanye anti THAAD dengan Menteri Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, telah menyebutkan THAAD sebanyak lebih dari 50 kali dalam pidatonya serta banyaknya retorika tentang penolakan THAAD yang disampaikan oleh otoritas Tiongkok terhadap media (Meick dan Salidjanova, 2017).

Tiongkok kemudian menegaskan untuk memberikan sanksi pada perusahaan Korea di bidang hiburan, barang konsumsi, serta menerapkan *banning* terhadap wisatawan Korea Selatan di Tiongkok (*The Diplomat*, 2017). Lebih lanjut, tak lama setelah pengumuman THAAD, beberapa acara yang menampilkan musik pop Korea Selatan dan aktor tiba-tiba dibatalkan secara sepihak (*Variety*, 2016). Siaran pemerintah regulator seperti *China Central Television* (CCTV) juga melarang penayangan acara TV Korea Selatan dan ekspor budayanya pada bulan September 2016 (*Financial Times*, 2016). Dalam segi konsumsi, Tiongkok kemudian melarang penjualan beberapa produk Korea Selatan, utamanya 19 kosmetik dan beberapa produk rumah tangga, dengan alasan keamanan (*Korea Times*, 2017). Administrasi Pariwisata Nasional Tiongkok juga memerintahkan agen perjalanan untuk berhenti menjual paket wisata ke Korea Selatan. Fenomena ini kemudian berdampak signifikan. Data dari Organisasi Pariwisata Korea Selatan menunjukkan bahwa 758.534 wisatawan Tiongkok pada Juni 2016 kini hanya berjumlah sekitar 254.930 wisatawan saja, yang mana turun sebanyak 66 persen (*Korea Tourism Organization*, 2017).

Menanggapi hal tersebut, Korea Selatan kemudian berupaya untuk meredakan kecemasan Tiongkok terhadap THAAD, dengan Menteri Luar Negeri, Kang Kyung-yang, mengumumkan bahwa Korea Selatan tidak menelisik informasi sistem THAAD lebih banyak lagi (*Washington Post*, 2017). Lebih lanjut, seorang juru bicara pemerintah Korea Selatan melalui CNN menyatakan bahwa mereka telah memperhatikan tindakan Tiongkok dengan mengelola hubungan kedua negara sambil tetap berpegang teguh kepada prinsip-prinsip mengenai masalah keamanan (CNN, 2017). Akan tetapi, keputusan tersebut tidak berlangsung lama, mengingat kedua belah pihak mempertahankan posisi yang tegas dalam instalasi THAAD. Laporan penelitian ini kemudian membahas lebih lanjut terkait motif Tiongkok yang sebenarnya dalam penolakan THAAD, yang notabene THAAD dibangun untuk melindungi keamanan nasional Korea Selatan semata.

### ***Security Dilemma yang Timbul Akibat THAAD***

Analisis Hubungan Internasional dalam kasus Semenanjung Korea, Jae-Jung Suh, lalu mengatakan bahwa negara-negara yang terlibat dalam isu Korea Utara sebenarnya terjebak dalam *security dilemma*, di mana penguatan keamanan suatu negara secara defensif tetap saja berpotensi menyinggung negara lain, sehingga negara lain menciptakan tindakan defensif guna melawannya, yang akhirnya menjadi *loop* yang tidak berakhir (Suh, 2017). Suh (2017) kemudian berargumen bahwa dilema tersebut dapat memengaruhi sekutu, tetangga, hingga lawan, sehingga semakin banyak negara *superpower* yang terjebak dalam dilema tersebut. Kondisi tersebut kemudian mengakibatkan perluasan perlombaan senjata secara geografis sehingga menimbulkan keterlibatan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan utamanya Tiongkok. Dari literatur tersebut, peneliti menemukan bahwa Korea Selatan dan Korea Utara terjebak dalam dilema keamanan berantai, yang mana meluas ke negara-negara lain seperti Tiongkok yang keamanan nasionalnya dipengaruhi oleh tindakan dan reaksi mereka. Dengan hadirnya Amerika Serikat sebagai aktor baru dalam perlombaan senjata nuklir di Asia, Tiongkok justru semakin khawatir dalam pembangunan sistem THAAD di Korea Selatan, karena Tiongkok sendiri memiliki kewaspadaan tertentu terhadap Amerika Serikat.

Peneliti kemudian berargumen bahwa Tiongkok yang ingin menggantikan posisi Amerika Serikat di kawasan Asia lalu mulai menganggap bahwa munculnya rencana pengembangan THAAD antara Amerika Serikat dan Korea Selatan sebagai tindakan provokasi terhadap kesepakatan nuklir yang sudah dibuat di kawasan. Swaine (2017) lalu mencatat pernyataan

Direktur Jenderal Departemen Pengendalian Senjata di Kementerian Luar Negeri Tiongkok kepada PBB dalam pidato Oktober 2016, yang mengatakan bahwa penempatan sistem pertahanan rudal global oleh Amerika Serikat justru akan menghambat proses pelucutan nuklir itu sendiri dan memicu adanya perlombaan senjata regional, dan berpotensi meningkatkan konfrontasi militer. Dalam hal ini, pengembangan sistem THAAD dianggap tidak akan mewujudkan denuklirisasi dan stabilitas perdamaian di Semenanjung Korea. Beberapa penstudi dari *China Institute of International Studies* juga menyatakan bahwa alih-alih memfasilitasi perdamaian dan stabilitas di Semenanjung Korea, pengembangan THAAD justru akan melukai keseimbangan strategis regional yang sudah rapuh, terlepas dari kemampuan THAAD untuk hanya menyerang senjata nuklir milik Korea Utara saja (*China-United States Focus*, 2016). Mereka berpendapat bahwa hal tersebut justru akan meningkatkan ketegangan serta memicu babak baru yang merusak persaingan keamanan antara Korea Utara dan Korea Selatan. Lebih lanjut, mereka menekankan bahwa upaya satu pihak untuk mengkonsolidasikan keamanan tidak boleh dilakukan dengan mengorbankan kepentingan keamanan pihak lain. Selain itu, Tiongkok sebagai *rising power* di Asia kemudian dapat memanfaatkan ketegangan tersebut untuk mendapatkan kepercayaan institusi global, yang mana dapat memperkuat posisinya sebagai *new major power* di kawasan.

Fan Gaoyue, selaku mantan peneliti di Akademi Ilmu Militer *People's Liberation Army* (PLA), berpendapat bahwa sistem THAAD juga berpotensi menguntungkan Korea Utara, mengingat Korea Utara dapat menggunakan adanya pengembangan sistem tersebut sebagai alasan untuk mengembangkan rudal baru dan mempercepat pengembangan program senjata nuklirnya (Gaoyue, 2016). Dengan kata lain, adanya THAAD justru dapat memperkuat keputusan politik militer serta persiapan persenjataan dari Korea Utara. Hal ini tentunya menciptakan permasalahan baru di kawasan, mengingat sebenarnya Tiongkok telah ikut serta dalam perundingan seperti *Six-Party Talks* dalam menangani masalah nuklir Korea Utara. Bahkan, permasalahan THAAD sendiri dapat menciptakan skenario buruk bagi tiap-tiap negara yang terlibat, mengingat Tiongkok sendiri mempercayai bahwa adanya THAAD dapat memunculkan perlombaan persenjataan yang baru. Hal tersebut memungkinkan Tiongkok untuk bersikap tidak kooperatif lagi dalam menyelesaikan masalah nuklir di Korea Utara, karena upaya perundingan yang dilakukan oleh Tiongkok kurang menjadi opsi yang dipertimbangkan. Hal ini kemudian dapat mendorong Tiongkok untuk mengerahkan pasukan dan senjatanya ke daerah-daerah di sekitar Semenanjung Korea guna mengawasi dampak buruk yang dapat ditimbulkan dari adanya THAAD. Skenario ini tentunya akan ditanggapi

oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan memperkuat kemampuan militer dan persenjataannya di kawasan Semenanjung Korea, sehingga dapat menimbulkan ketegangan yang lebih besar lagi antara masing-masing pihak.

### **Dampak Keterlibatan Amerika Serikat dalam Instalasi THAAD sebagai *Security Dilemma* Baru bagi Tiongkok**

Peneliti kemudian menekankan tentang adanya hubungan perancangan senjata anti nuklir ini dengan persaingan geopolitik yang terjadi antara Tiongkok dan Amerika Serikat. Jika dikaitkan dengan studi kasus, maka peneliti berpendapat bahwa kebangkitan Tiongkok dapat menjadikan Amerika Serikat sebagai bukan lagi satu-satunya kekuatan besar di kawasan tersebut. Dengan kata lain, Asia Timur mungkin sedang menuju ke transisi baru akibat kemunculan kekuatan baru milik Tiongkok, yang mana berpotensi melemahkan hubungan Amerika Serikat dengan kawasan tersebut (Ikenberry, 2014). Guna mewujudkan hal tersebut, Tiongkok berpotensi akan mendominasi Asia Timur dengan mengejar *power gap* dengan negara-negara tetangganya, seperti kekuatan militer dan ekonomi. Menurut Mearsheimer (2006), Tiongkok ingin disegani sebagai negara yang berpengaruh di Asia Timur, sehingga tidak ada negara lain yang dapat mengancamnya, terlebih negara di luar kawasan seperti Amerika Serikat. Dengan kata lain, peneliti berpendapat bahwa Tiongkok ingin memainkan peran lebih di kawasan, sehingga menimbulkan pergantian posisi Amerika Serikat sebagai salah satu *major power* yang berpengaruh di Asia. Adanya kerjasama antara Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam upaya merancang senjata anti nuklir THAAD lalu dipandang oleh Amerika Serikat sebagai ancaman dalam perkembangan Tiongkok sebagai negara hegemon di Asia.

Peneliti berargumen bahwa keterlibatan Amerika Serikat di dalam instalasi THAAD memberikan dilema keamanan baru bagi Tiongkok, yang mana menciptakan situasi *balancing* antara Tiongkok dan Amerika Serikat di Asia. Dengan kata lain, Tiongkok berusaha mengimbangi kekuatan Amerika Serikat di Asia sebagai akibat dari munculnya THAAD yang mana dipercayai justru mendorong adanya perlombaan senjata nuklir. Dalam hal ini, realisme defensif dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku Tiongkok, yang mana Tiongkok di sepanjang tahun 2016 cenderung tidak ekspansif, berfokus dalam memperkuat pembangunan nasionalnya, serta memiliki kecenderungan untuk tidak agresif dalam menyaingi kekuatan Amerika Serikat. Argumen ini kemudian diperkuat dengan pernyataan Yang Xiye, yang mana berargumen bahwa THAAD akan memperpanjang kewaspadaan

Tiongkok terhadap Amerika Serikat ke arah yang lebih kompleks (*China-United States Focus*, 2016). Selain karena faktor historis yang memunculkan kewaspadaan terhadap Amerika Serikat, Tiongkok juga mempelajari bahwa Amerika Serikat memiliki skenario lain dalam perancangan THAAD. Analisis dari Yang Xiye lalu mengatakan bahwa Tiongkok telah menyadari bahwa Amerika Serikat dapat mengambil keuntungan dari ancaman rudal Korea Utara untuk memperluas persenjataan militernya di Asia Timur, mengingat Amerika Serikat juga membangun ‘tembok’ anti rudal di berbagai negara di Eropa dengan dalih ‘ancaman rudal Iran’ (*China-United States Focus*, 2016). Dengan kata lain, Tiongkok menyadari bahwa Amerika Serikat dapat memanfaatkan momentum dari adanya ‘ancaman rudal Korea Utara’ untuk memperkuat sistem anti rudal yang berada di Samudra Atlantik dan Pasifik. Pengadaan rencana tersebut sebenarnya dapat diprediksi, mengingat Amerika Serikat pada tahun 2016 berjanji bahwa mereka akan menanggung seluruh biaya yang dibutuhkan untuk membangun THAAD di Seoul serta menjamin kapabilitas dari senjata tersebut (ISDP, 2017). Akibatnya, sistem THAAD kemudian juga berpotensi meningkatkan kewaspadaan Amerika Serikat terhadap senjata strategis Tiongkok, yang mana menciptakan *security dilemma* bagi Tiongkok sendiri di kawasan. Selain itu, analisis dari Yang Xiye menjelaskan bahwa di dalam skenario perselisihan kekuatan besar di Asia, maka Korea Selatan dapat menjadi target yang paling utama dan korban terlemah (*China-United States Focus*, 2016). Hal ini dikarenakan jika Korea Selatan memiliki THAAD, maka pangkalan militer yang menampung senjata tersebut secara logis akan dimasukkan ke dalam daftar target utama yang akan dihancurkan dalam perang oleh militer negara lain yang tengah berkonflik di sekitar kawasan Asia, walaupun semisal Korea Selatan sendiri tidak terlibat dalam peperangan tersebut.

Keputusan Amerika Serikat terkait dengan pencegahan perkembangan senjata nuklir di Asia kemudian telah berlangsung saat Uni Soviet mencoba memberikan pengaruhnya di kawasan tersebut. Pada masa Perang Dingin, Amerika Serikat memberikan kebijakan *nuclear umbrella* kepada negara-negara aliansi non-nuklir guna menjamin keamanan negara-negara tersebut dari senjata nuklir. Kebijakan *nuclear umbrella* sendiri lalu menjadi salah satu elemen dari kebijakan keamanan Amerika Serikat yang lebih luas terhadap Asia Timur, karena Amerika Serikat saat itu telah bersedia mengancam penggunaan senjata nuklir terhadap musuh sekutu-sekutunya, sehingga para sekutu merasa kurang terdorong untuk mengejar opsi nuklir (Bush, 2011). Pasca runtuhnya Uni Soviet, penggunaan kebijakan *nuclear umbrella* oleh Amerika Serikat kemudian mengalami pergeseran ketika Tiongkok muncul sebagai kekuatan relatif

yang tumbuh di Asia untuk menyaingi kekuatan Amerika Serikat. Kebangkitan Tiongkok kemudian dapat ditelusuri pada tahun 1979, yang mana sistem ekonomi baru yang diterapkan di Tiongkok menciptakan perkembangan pesat di bidang militer serta memperoleh kemampuan untuk memodernisasi persenjataan nuklirnya. Pertumbuhan ekonomi Tiongkok lalu dinilai oleh Amerika Serikat telah memberi manfaat besar bagi negara-negara Asia Timur (Bush, 2011). Perkembangan kekuatan Tiongkok yang semakin besar kemudian menimbulkan kekhawatiran Amerika Serikat dalam menumbuhkan kepercayaan para aliansinya di Asia, sehingga terdapat kecenderungan dari Amerika Serikat untuk membendung pengaruh Tiongkok di kawasan.

Peneliti berargumen bahwa Tiongkok turut mengalami *security dilemma* sebagai akibat dari munculnya Amerika Serikat dalam perencanaan THAAD. *Security dilemma* baru yang dialami Tiongkok kemudian dapat ditelusuri dari rencana Tiongkok untuk berkoordinasi dengan Rusia dalam program pertahanan dan penyebaran rudal sebagai respon atas THAAD (Meick dan Salidjanova, 2017). Ethan (2017) kemudian mengutip bahwa pada Mei 2016, tiga bulan setelah adanya perundingan THAAD antara Amerika Serikat dan Korea Selatan, Tiongkok mengajak Rusia untuk bersama-sama mengadakan latihan simulasi pertahanan rudal, yang mana sebenarnya direncanakan pada tahun 2017. Tiongkok juga memutuskan untuk menindaklanjuti THAAD dengan mempersiapkan latihan pertahanan rudal yang lebih kompleks, pengembangan varian dan teknologi rudal baru, penempatan rudal yang terkoordinasi, serta rencana adanya pertukaran data dan informasi antara Tiongkok dan Rusia (Ethan, 2017).

### **Kenaikan *Power* sebagai Faktor Tiongkok Menolak THAAD**

Perkembangan industrialisasi di Tiongkok kemudian menjadi salah satu faktor terjadinya upaya transisi kekuatan di sistem internasional. Hingga tahun 2016, Tiongkok merupakan negara yang memiliki pembangkit tenaga listrik terbesar di dunia (Wen, 2016). Selain itu, Tiongkok memproduksi hampir 50 persen dari barang industri utama dunia, termasuk baja mentah (800 persen dari produksi Amerika Serikat dan 50 persen dari pasokan dunia), semen (60 persen dari produksi dunia), batubara (50 persen dari produksi dunia), kendaraan (lebih dari 25 persen dari pasokan dunia) serta industri aplikasi paten (sekitar 150 persen dari tingkat Amerika Serikat) (Wen, 2016). Tak hanya itu, kemajuan Tiongkok sebagai negara industri juga dapat ditinjau dari statusnya sebagai produsen kapal terbesar di dunia, kereta berkecepatan tinggi, robot, terowongan, jembatan, jalan raya, serat kimia, peralatan mesin,



komputer, serta ponsel (Wen, 2016). Selain dari faktor industrialisasi, jumlah penduduk dan efisiensi politik juga turut mempengaruhi ambisi Tiongkok untuk melakukan *power transition* di sistem internasional. Berdasarkan *world development indicators* dari World Bank (2016), Tiongkok memiliki populasi sebesar 1,379 miliar pada tahun 2016 dengan keanggotaan partai komunis mencapai 89 juta, atau satu dari setiap delapan orang dewasa di Tiongkok. Dengan perkembangan faktor-faktor sebagai penunjang *power transition*, maka besar kemungkinan bahwa Tiongkok berperan lebih besar sebagai negara yang dominan di kawasan Asia.

Menurut *power transition theory*, bagaimana suatu negara dapat menggeser negara *superpower* juga dapat ditinjau melalui efisiensi politiknya (Organski, 1958). Bagaimana efisiensi politik tersebut dijalankan kemudian dapat ditinjau dari rasa kepercayaan warga negara terhadap perubahan politik dan sosial dalam pemerintahan (Hu, 2016). Keberhasilan dalam efisiensi politik kemudian dapat digunakan juga untuk memprediksi partisipasi pemilihan suara, tetapi juga mencerminkan sikap publik terhadap pemerintah dan tingkat ketidakpuasan terhadap sistem pemerintah (Sullivan dan Riedel, 2001). Menurut analisis Hu (2016), banyak analis berpendapat bahwa politik di negara-negara komunis tidak mengakui adanya partisipasi politik oleh masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dengan model totaliter dapat menekankan kontrol atas para elit masyarakat serta kontrol atas media massa (Hu, 2016). Peneliti kemudian berargumen bahwa hal tersebut dapat membatasi kebebasan masyarakat untuk bersuara dalam politik, sehingga pemerintah dapat mencegah rakyat yang ingin menolak otoritas politik. Hal ini kemudian yang menciptakan efisiensi politik tersendiri bagi Tiongkok, yang mana Tiongkok membatasi suara masyarakat dalam politik. Upaya pembatasan tersebut lalu dapat ditinjau dari bagaimana pejabat pemerintah tingkat tinggi tidak dipilih secara langsung oleh orang banyak di Tiongkok dan bagaimana warga negara tidak dapat menyuarakan aspirasi mereka melalui proses pemilihan umum dan terbuka (Hu, 2016). Walaupun pemilihan para pejabat pemerintah tingkat tinggi diwakilkan oleh perwakilan kongres rakyat, para kandidat-kandidatnya pun dicalonkan oleh Partai Komunis dan bukan oleh warga negara.

Bagaimana *power transition theory* memandang pergeseran kekuatan dalam sistem internasional juga dapat dilihat dari faktor populasi. Dari segi jumlah populasi, Tiongkok yang memiliki populasi penduduk terbanyak di dunia juga berhadapan dengan pertumbuhan populasi yang akan turun dalam jangka panjang (Hodgson, 2016). Menurut grafik populasi dunia di tahun 2016, walaupun penduduk Tiongkok dengan usia 25 hingga 29 memiliki

jumlah terbanyak dengan total 125 juta jiwa, namun penduduk dengan usia lanjut yang tidak memiliki usia produktif untuk bekerja juga terhitung banyak. Jika dibandingkan dengan tingkat kelahiran Tiongkok yang rendah di tahun 2016, maka dapat diprediksi bahwa pertumbuhan populasi akan melambat dari tahun ke tahun. Analisis dari Hodgson (2016) kemudian berargumen bahwa Tiongkok dapat memanfaatkan kondisi demografi tersebut untuk meningkatkan keuntungan ekonomi. Pertama, tenaga kerja yang semakin berkurang sebenarnya dapat menekan biaya tenaga kerja yang harus dibayarkan, sementara kekurangan tenaga kerja tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh industri teknologi dan otomasi. Hal ini kemudian dapat ditinjau dari perindustrian Tiongkok yang berkaitan dengan aplikasi paten yang memiliki persentase sekitar 150 persen dari Amerika Serikat dan industri otomasi yang memproduksi lebih dari 25 persen dari pasokan dunia (Wen, 2016). Kedua, pertumbuhan konsumen Tiongkok yang rata-rata berusia tua dapat menjadi potensi untuk menciptakan peluang bisnis baru di bidang keperawatan lansia, kesehatan, hingga peralatan rumah tangga (Hodgson, 2016). Ketiga, tren migrasi dari desa ke kota-kota menengah tingkat bawah di era globalisasi dapat menciptakan perubahan gaya hidup rumah tangga (Hodgson, 2016). Hal ini kemudian dapat menciptakan permintaan konsumen yang lebih banyak serta memunculkan berbagai model bisnis baru.

### **Bagaimana Tiongkok Memandang Amerika Serikat, Asia, dan Korea Utara**

Jika ditelusuri menggunakan kode geopolitik, maka Tiongkok cenderung menganggap Amerika Serikat sebagai musuh potensial di masa depan. Dalam mengatasi hegemoni Amerika Serikat di sekitar Tiongkok, Tiongkok kemudian melakukan pergeseran pandangan terhadap dirinya, yang mana kini ia menerapkan nasionalisme pragmatis dalam menetapkan perdamaian sebagai tujuan internasional utama Tiongkok. Menurut Zhao (2008), nasionalisme pragmatis bagi Tiongkok merupakan kebijakan yang reaktif, dalam artian ia digerakkan sesuai dengan permasalahan yang sedang terjadi. Selain itu, nasionalisme pragmatis juga tidak memiliki ideologi yang terdefinisi secara tetap dan obyektif serta tidak didorong juga oleh ideologi-ideologi yang lain. Menurut Zhao (2008), Tiongkok memandang kemakmuran ekonomi sebagai jalan bagi partai komunis untuk tetap berkuasa dan juga fondasi bagi aspirasi nasionalistik Tiongkok yang meningkat. Selain itu, stabilitas politik di dalam negeri diterapkan sebagai kondisi yang diperlukan untuk mencapai modernisasi Tiongkok. Oleh karena itu, para pemimpin pragmatis Tiongkok berusaha menghindari konfrontasi dengan negara-negara yang sekiranya memegang peranan penting bagi modernisasi Tiongkok dan begitu pula sebaliknya. Negara besar yang menjadi ancaman bagi

Tiongkok akan dianggap sebagai penghambat Tiongkok dalam memodernisasi negara serta memberikan kesejahteraan bagi rakyat (Zhao, 2008).

Fenomena kebangkitan Tiongkok kemudian menjadi sorotan, mengingat Amerika Serikat sejak dulu memiliki banyak peranan dalam menciptakan geopolitik bagi negara-negara di kawasan Asia. Menurut Ikenberry (2014), Amerika Serikat telah menjadi aktor negara di luar Asia yang memiliki pengaruh dalam peperangan di Asia Timur dan Asia Tenggara, seperti Perang Pasifik dan Perang Vietnam. Tak hanya itu, mereka pula menjalin kerjasama keamanan dengan Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lain, salah satunya demi memperjuangkan perdagangan terbuka transregional (Ikenberry, 2014). Amerika Serikat juga sempat menerapkan sistem *hub and spoke* kepada aliansi mereka di Asia selama Perang Dingin guna menciptakan suatu tatanan regional di Asia. Ikenberry (2014) juga menyinggung bahwa Amerika Serikat mulai melibatkan Tiongkok dalam pergantian sistem dagang menuju liberalisasi pasar dan pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada perdagangan di sekitar tahun 1980-an. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga berhasil menyebarkan nilai liberalismenya dan membuat beberapa negara di Asia seperti Korea Selatan, Filipina, dan Thailand kemudian mengganti sistem pemerintahan yang otoriter dengan sistem demokrasi yang berbasis kepada rakyat (Ikenberry, 2014). Melalui berbagai peristiwa tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa salah satu alasan Asia menjadi kawasan dengan perkembangan yang dinamis semata-mata tidak lepas dari peran Amerika Serikat dalam memberikan pengaruhnya di kawasan, utamanya pasca Perang Dingin.

Dengan pengaruh Amerika Serikat yang kuat di kawasan, Tiongkok kemudian semakin mewaspadaai pergerakan Amerika Serikat, utamanya dalam ideologi. Menurut Nathan dan Scobell (2012), masih banyak literatur dari analisis Tiongkok yang mempercayai bahwa Amerika Serikat memiliki senjata 'ideologis' yang masih digunakan hingga sekarang. Argumen tersebut kemudian diperkuat melalui bagaimana Amerika Serikat menggunakan posisinya sebagai negara *superpower* pasca keruntuhan Uni Soviet untuk menyebarkan prinsip-prinsip kemanusiaan dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia versi Amerika Serikat ke penjuru dunia. Hal tersebut yang kemudian menjadi inspirasi bagi negara-negara di Asia, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan untuk mengikuti demokrasi yang disebarkan oleh Amerika Serikat. Hal ini yang mana menjadi ancaman ideologi bagi Tiongkok.

Menurut Nathan dan Schobell (2012), masih banyak elit Tiongkok yang beranggapan bahwa Amerika Serikat berpotensi untuk menggunakan ide-ide demokrasi untuk melemahkan rezim

yang ideologinya bertentangan, seperti sosialisme dan otoritarianisme. Lebih lanjut, salah satu elit Tiongkok dari Partai Komunis menyatakan bahwa Amerika Serikat tidak memiliki tujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia, namun mereka menggunakan dalih tersebut untuk membatasi pergerakan Tiongkok, membatasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, serta mencegah Tiongkok sebagai hegemon dunia (Nathan dan Schobell, 2012). Bagaimana Tiongkok memandang Amerika Serikat kemudian dapat dilihat dari ancaman Amerika Serikat dalam menjadi negara hegemon yang mempengaruhi stabilitas kawasan itu sendiri. Mahbubani (2005) juga memiliki opini yang sama, yang mana meskipun hampir tidak ada yang dapat dilakukan Tiongkok untuk mengusik stabilitas politik Amerika Serikat, Amerika Serikat sendiri memiliki banyak opsi untuk mengganggu kepentingan nasional Tiongkok. Mahbubani (2005) kemudian mencontohkan salah satu kasus keamanan yang membuat Tiongkok skeptis dengan kegiatan Amerika Serikat di Asia, yaitu serangan rudal 1999 terhadap kedutaan Tiongkok di Belgrad selama perang di Balkan. Para petinggi Amerika Serikat sendiri sebenarnya telah mengklaim bahwa hal tersebut ialah suatu kesalahan yang tidak disengaja dari Amerika Serikat, akan tetapi banyak orang Tiongkok yang tetap yakin bahwa pemboman tersebut merupakan aksi yang disengaja. Merujuk pada kecanggihan teknologi pengawasan militer Amerika Serikat saat itu, Tiongkok lalu berpegang pada keyakinan bahwa serangan itu dimaksudkan sebagai pesan ke Tiongkok untuk mewaspadaikan kekuatan Amerika Serikat (Mahbubani, 2005).

Kewaspadaan Tiongkok terhadap Amerika Serikat juga semakin meningkat, mengingat di era sekarang, banyak militer Amerika Serikat yang 'berkeliranan' di sekitar pinggiran wilayah Tiongkok serta upaya Amerika Serikat yang gencar melakukan kerjasama keamanan dengan tetangga-tetangga di Tiongkok. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga merupakan negara besar yang terus menghalangi Tiongkok untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan. Amerika Serikat lalu juga dianggap mengganggu Tiongkok dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang terkadang merugikan serta mempertahankan sejumlah program pemerintah dan swasta yang berusaha untuk mempengaruhi masyarakat sipil dan politik Tiongkok (Nathan dan Scobell, 2012). Dampak turunnya Muammar Gadhafi sebagai Presiden Libya akibat adanya intervensi dari Amerika Serikat juga berdampak terhadap perjanjian perdagangan dan investasi Tiongkok di Libya. Pemboman terhadap sejumlah kota-kota di Libya kemudian memaksa Tiongkok untuk menarik investasi sejumlah miliaran dolar dan mengembalikan 35.000 insinyur dan pekerja konstruksi minyak dari Libya ke Tiongkok (Petras, 2012). Jika dihubungkan dengan kode geopolitik, maka Amerika Serikat berpotensi untuk menjadi

musuh dari Tiongkok, dikarenakan pengaruh Amerika Serikat yang mengganggu kepentingan dari Tiongkok.

Bagaimana Tiongkok memandang kawasan Asia sebagai penunjang penting adalah salah satunya dipengaruhi oleh insiden Tiananmen pada tahun 1989. Insiden Tiananmen sendiri terjadi akibat adanya inflasi harga yang tinggi serta banyaknya kesempatan bagi para pejabat pemerintah untuk melakukan korupsi (Britannica, 2019). Permasalahan tersebut lalu menyebabkan munculnya aksi protes yang menyebabkan ribuan mahasiswa berkumpul di Tiananmen Square untuk berunjuk rasa terkait dengan pemerintahan yang demokratis, yang mana aksi ini juga diikuti oleh kalangan mahasiswa lainnya di Shanghai, Nanjing, Xi'an, Changsha, dan Chengdu (Britannica, 2019). Sejarah kemudian mencatat bahwa lebih dari 3.000 penduduk sipil menjadi korban pasukan bersenjata yang dipimpin oleh pemerintahan Deng Xiaoping saat itu (Britannica, 2019). Sebagai akibatnya, Tiongkok lalu mendapatkan sanksi oleh dunia internasional yaitu berupa sanksi ekonomi dan isolasi ekonomi oleh negara-negara Barat (Zhao, 2004). Akan tetapi, insiden tersebut ternyata hanya memiliki dampak kecil bagi hubungan Tiongkok dengan negara-negara lain di Asia. Hal ini kemudian dapat dilihat sebagai titik balik kecenderungan Tiongkok untuk berinteraksi dengan negara-negara Asia lainnya. Hubungan diplomatik antara Tiongkok dengan yang lainnya kemudian dapat dilihat dari bagaimana Tiongkok meningkatkan hubungan bilateral dengan Rusia serta beberapa negara-negara di Asia Tenggara pasca insiden Tiananmen (Xingjun, 2012). Dari analisis tersebut, peneliti menggarisbawahi bahwa baik dimulai dari reformasi keterbukaan Tiongkok terhadap dunia luar maupun insiden Tiananmen yang menimbulkan sanksi dari Barat, keduanya mendorong Tiongkok untuk semakin mementingkan regional kawasan dalam kebijakan luar negerinya.

Dalam kode geopolitik, suatu negara akan mencari cara untuk mempertahankan hubungan geopolitiknya dengan sekutu dan sekutu potensial, seperti mengedepankan solusi diplomatik dan kerjasama ekonomi. Peneliti mengkaji bahwa hal ini yang dilakukan oleh Tiongkok terhadap Korea Utara sebagai sekutunya, yang mana dilakukannya melalui upaya diplomatik dalam penyelesaian konflik nuklir di Asia. Upaya Tiongkok dalam mengedepankan kerjasama dan perdamaian dalam penyelesaian konflik dari masa ke masa turut menginisiasi *Six-Party Talks* pada tahun 2003 di Beijing (Arms Control, 2018). *Six-Party Talks* sendiri dihadiri oleh Tiongkok, Jepang, Korea Utara, Rusia, Korea Selatan, dan Amerika Serikat dengan tujuan menghentikan program nuklir Korea Utara (Arms Control, 2018). Wakil Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi kemudian mengutarakan bahwa perundingan

pertama menghasilkan komitmen dari pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja dalam menyelesaikan masalah nuklir melalui cara-cara damai dan dialog antar negara, menciptakan Semenanjung Korea yang bebas nuklir sambil tetap memperhatikan keamanan Korea Utara, dan menghindari tindakan-tindakan yang akan memperburuk situasi penyelesaian senjata nuklir lebih jauh (*Arms Control*, 2018). Jika dihubungkan dengan kondisi THAAD, maka dapat ditinjau bahwa upaya perundingan tersebut tidak sejalan dengan kondisi yang ada sekarang. Kondisi tersebut lalu dapat dilihat dari bagaimana Korea Utara tetap mengembangkan proyek nuklirnya, sementara Korea Selatan dan Amerika Serikat secara sepihak memutuskan untuk membangun senjata anti nuklir. Peneliti beranggapan bahwa kondisi tersebut telah melanggar perjanjian yang disepakati di dalam perundingan yang diinisiasi oleh Tiongkok, yang mana menyebabkan Tiongkok menolak adanya pembangunan THAAD tersebut. Selain itu, Tiongkok merasa bahwa adanya pelanggaran perjanjian oleh Amerika Serikat dan Korea Selatan dapat mengurangi hubungan geopolitiknya dengan Korea Utara, karena solusi diplomatik yang diajukan tidak sesuai dengan hasilnya. Jika Korea Utara tidak menemukan solusi diplomatik, Tiongkok khawatir bahwa ketegangan senjata nuklir di Asia akan berlangsung lebih lama.

## **Kesimpulan**

Pertama, Tiongkok sebagai negara yang menjunjung tinggi perdamaian di kawasan Asia memiliki kewaspadaan bahwa pembangunan senjata anti nuklir THAAD justru dapat memicu adanya ketegangan antara Korea Selatan dan Korea Utara, walaupun kapabilitas senjata tersebut sebenarnya tidak dapat digunakan untuk melukai pertahanan Tiongkok seperti yang mereka klaim. Pasalnya, Tiongkok mempercayai bahwa tindakan tersebut justru membuat Korea Utara dipandang seolah-olah sebagai negara yang benar-benar akan meluncurkan senjata nuklirnya ke Korea Selatan, dan hal tersebut justru akan menyinggung Korea Utara sehingga terjadi perlombaan nuklir di kawasan tersebut. Selain menciptakan perlombaan senjata nuklir di kawasan, Tiongkok sendiri juga memiliki kewaspadaan terhadap upaya kedekatan Amerika Serikat terhadap Korea Selatan dalam proyek THAAD. Hal ini dikarenakan keduanya saling mewaspadaikan satu sama lain, yang mana Amerika Serikat mengantisipasi pergerakan Tiongkok sebagai *major power* dengan perekonomiannya yang meningkat, sementara Tiongkok sedang gencar untuk melakukan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Masalahnya, Tiongkok tidak dapat mendorong pembangunan nasionalnya jika terdapat ketidakamanan di kawasan Asia, dikarenakan integrasi ekonomi antar negara-negara merupakan salah satu penunjang ekonomi

bagi Tiongkok. Bagi Tiongkok, kehadiran Amerika Serikat yang mendominasi Asia dengan memutuskan secara sepihak untuk membangun senjata anti nuklir dengan Korea Selatan justru membahayakan keamanan kawasan Asia.

Kedua, Tiongkok merasa curiga dengan adanya keputusan sepihak untuk membangun THAAD yang dilakukan oleh Korea Selatan dan Amerika Serikat. Hal ini dikarenakan beberapa pandangan Tiongkok dalam melihat Amerika Serikat sebagai lawan potensial. Tiongkok melihat negara-negara Barat, utamanya Amerika Serikat, sebagai militeristik, berpikiran keras, ekspansionis, dan egois. Selain itu, Tiongkok juga memiliki pandangan bahwa Amerika Serikat memiliki kekuatan kapitalis yang berusaha untuk mengeksploitasi seluruh dunia. Banyak pula elit Tiongkok yang beranggapan bahwa Amerika Serikat berpotensi untuk menggunakan ide-ide demokrasi untuk melemahkan rezim yang memiliki ideologi bertentangan, seperti sosialisme dan otoritarianisme. Kewaspadaan ini kemudian meningkat, mengingat Tiongkok pernah mengalami serangan rudal tahun 1999 yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap kedutaan Tiongkok di Belgrad selama perang di Balkan. Dengan kata lain, Tiongkok percaya bahwa Amerika Serikat tidak memiliki tujuan untuk melindungi Hak Asasi Manusia, namun mereka menggunakan dalih tersebut untuk membatasi pergerakan Tiongkok, membatasi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, serta mencegah Tiongkok sebagai hegemon dunia.

Kewaspadaan Tiongkok terhadap Amerika Serikat juga semakin meningkat, mengingat di era sekarang, banyak militer Amerika Serikat yang 'berkelir' di sekitar pinggiran wilayah Tiongkok serta upaya Amerika Serikat yang gencar melakukan kerjasama keamanan dengan tetangga-tetangga di Tiongkok. Tak hanya itu, Amerika Serikat juga merupakan negara besar yang terus menghalangi Tiongkok untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan. Amerika Serikat lalu juga dianggap mengganggu Tiongkok dengan menerapkan kebijakan ekonomi yang terkadang merugikan serta mempertahankan sejumlah program pemerintah dan swasta yang berusaha untuk mempengaruhi masyarakat sipil dan politik Tiongkok (Nathan dan Scobell, 2012).

Selanjutnya, Tiongkok memandang bahwa Asia merupakan kawan potensial, dikarenakan pembangunan nasional Tiongkok yang pesat banyak dipengaruhi oleh kebijakan regional. Hal ini dapat ditinjau dari pengembangan kebijakan regional pada awal 1980-an yang dikenal dengan Kebijakan Pinggiran (*zhuobian zhengce*) atau Kebijakan Tetangga Baik (*mulin zhengce*). Kebijakan ini lalu didasari oleh keinginan Tiongkok untuk menumbuhkan

perekonomiannya dengan melakukan perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok serta menyelesaikan permasalahan bersama di kawasan terkait dengan isu-isu ekonomi dan keamanan masing-masing negara di Asia. Alasan lain Tiongkok mengedepankan kebijakan regional adalah sanksi dan isolasi ekonomi oleh negara-negara Barat atas insiden Tiananmen. Peneliti menganalisis bahwa saat itu terdapat titik balik kecenderungan Tiongkok untuk berinteraksi dengan negara-negara Asia lainnya. Hubungan diplomatik antara Tiongkok dengan yang lainnya kemudian dapat dilihat dari bagaimana Tiongkok meningkatkan hubungan bilateral dengan Rusia serta beberapa negara-negara di Asia Tenggara pasca insiden Tiananmen. Terakhir, Korea Utara merupakan salah satu kawan potensial bagi Tiongkok, oleh karenanya ia menggunakan upaya-upaya diplomasi guna menghindari ketegangan yang timbul dari Korea Utara. Tiongkok kemudian memandang THAAD sebagai ancaman bagi Korea Utara, sehingga ia berupaya untuk menolak perancangan senjata tersebut.



## Daftar Pustaka

- Arms Control. 2018. *The Six-Party Talks at a Glance*. [ONLINE] <https://www.armscontrol.org/factsheets/6partytalks> [Diakses pada 5 Mei 2019].
- BBC. 2017. *North Korea's Nuclear Programme: How Advanced is it?*. [ONLINE] <http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11813699> [Diakses pada 7 Desember 2017].
- Britannica. 2019. *Tiananmen Square Incident*. [ONLINE] <https://www.britannica.com/event/Tiananmen-Square-incident> [Diakses pada 5 Mei 2019].
- Bush, Richard. 2011. *The U.S. Policy of Extended Deterrence in East Asia: History, Current, Views, and Implications*. Arms Control Series Brookings Paper 5.
- China-United States Focus. 2016. *THAAD: A Major Security Risk for the ROK*. [ONLINE] <https://www.chinausfocus.com/peace-security/thaad-a-major-security-risk-for-the-rok> [Diakses pada 14 Mei 2019].
- CNBC. 2017. *China lashes out as South Korea puts an American anti-missile system in place*. [ONLINE] <https://www.cnbc.com/2017/03/17/thaad-anti-missile-system-makes-china-lash-out-at-south-korea.html> [Diakses pada 7 Desember 2017].
- CNN. 2017. *Why South Korean companies, entertainers are getting cold shoulder in China*. [ONLINE] <https://edition.cnn.com/2017/02/23/asia/south-korea-china-thaad-retaliation/index.html> [Diakses pada 21 Maret 2017].
- Elleman, Michael & Zagurek, Michael J. 2016. *THAAD: What It Can and Can't Do*. Washington: 38 North Special Report.
- Ethan, Meick. 2017. *China-Russia Military-to-Military Relations: Moving toward a Higher Level of Cooperation*. [ONLINE] <https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/China-Russia%20MilMil%20Relations%20Moving%20Toward%20Higher%20Level%20of%20Cooperation.pdf>. [Diakses pada 17 Mei 2019].
- Financial Times. 2016. *Seoul Missile Move Sparks Fears for Pop Culture Exports to China*. [ONLINE] <https://www.ft.com/content/2fea068e-5d48-11e6-bb77-a121aa8abd95> [Diakses pada 14 Maret 2017].
- Gaoyue, Fan. 2016. *ROK: The Biggest Loser of THAAD*. [ONLINE] <http://www.chinausfocus.com/foreignpolicy/rok-the-biggest-loser-of-thaad>. [Diakses pada 16 Mei 2019].
- Hodgson, An. 2016. *China Demographics: With Challenges Come Opportunities* [ONLINE] <https://blog.euromonitor.com/china-demographics-challenges-opportunities/> [Diakses pada 14 Juni 2019].
- Hu, Rong. 2016. *The Impact of Chinese Political Efficacy and Political Participation on Their Trust in the Police*. *The Journal of Chinese Sociology* (2016) 3:3 DOI 10.1186/s40711-015-0024.
- Ikenberry, John. 2014. *From Hegemony to the Balance of Power: The Rise of China and American Grand Strategy in East Asia*. *International Journal of Korean Unification Studies* Vol. 23, No. 2.
- ISDP. 2017. *THAAD on the Korean Peninsula* [ONLINE] <http://isdp.eu/publication/korea-thaad/> [Diakses pada 13 Mei 2019].
- Korea Times. 2017. *China Ups THAAD Retaliation against Korean Products*. [ONLINE] [https://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2017/01/488\\_222465.html](https://www.koreatimes.co.kr/www/news/biz/2017/01/488_222465.html) [Diakses pada 14 Maret 2017].
- Korea Tourism Organization. 2017. *Monthly Statistics of Korea Tourism*. [ONLINE] <https://kto.visitkorea.or.kr/eng/tourismStatics/keyFacts/KoreaMonthlyStatistics.kto> [Diakses pada 14 Maret 2017].

- Lee, Jeong-jin. 2016. *Storm after THAAD: All high-level Sino-South Korean military talks halt*. [ONLINE] <http://www.yonhapnews.co.kr/bulletin/2016/11/04/0200000000AKR20161104109000014.HTML> [Diakses pada 14 Maret 2017].
- Mahbubani, Kishore. 2005. *Understanding China: The Waking Dragon*. Foreign Affairs: Volume 84 No.5.
- Mearsheimer, John J. 2006. *China's Unpeaceful Rise*. Current History. p. 105.
- Meick, Ethan dan Salidjanova, Nargiza. 2017. *China's Response to U.S.-South Korean Missile Defense System Deployment and its Implications*. Washington DC: United States-China Economic and Security Review Commission.
- Nathan, Andrew dan Scobell, Andrew. 2012. *How China Sees America: The Sum of Beijing's Fear*. Foreign Affairs Volume 91 Number 5.
- Organski, A. F. K. 1958. *World Politics*. New York, NY: Alfred A. Knopf.
- Suh, J. J. 2017. *Missile Defense and the Security Dilemma: THAAD, Japan's "Proactive Peace," and the Arms Race in Northeast Asia*. The Asia-Pacific Journal, Volume 15, Issue 9, Number 5.
- Sullivan, J.L., dan E. Riedel. 2001. *Efficacy: Political*. International Encyclopedia of Social and Behavioral Sciences. New York: Elsevier Science Ltd.
- Swaine, Michael. 2017. *Chinese views on South Korea's deployment of THAAD*. China Leadership Monitor, 52(4).
- The Diplomat. 2017. *China Hits Back at South Korea's THAAD Deployment Following North Korea's Latest ICBM Test*. [ONLINE] <https://thediplomat.com/2017/08/china-hits-back-at-south-koreas-thaad-deployment-following-north-koreas-latest-icbm-test/> [Diakses pada 7 Desember 2017].
- The Guardian. 2017. *China to Enforce UN Sanctions against North Korea*. [ONLINE] <https://www.theguardian.com/world/2017/sep/23/china-to-enforce-un-sanctions-against-north-korea> [Diakses pada 7 Desember 2017].
- UN. 2017. *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons*. [ONLINE] <https://www.un.org/disarmament/wmd/nuclear/npt/> [Diakses pada 7 Desember 2017].
- Variety. 2016. *China Reportedly Bans Korean TV Content and Talent*. [ONLINE] <https://variety.com/2016/biz/asia/chinaconfirms-ban-on-korean-content-talent-1201830391/> [Diakses pada 14 Maret 2017].
- Wang Yi Talks about US's Plan to Deploy THAAD Missile Defense System in ROK, 2016. Beijing: Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China.
- Washington Post. 2017. *South Korea and China Move to Normalize Relations after THAAD Dispute*. [ONLINE] [https://www.washingtonpost.com/world/south-korea-and-china-move-to-normalize-relations-after-thaad-conflict/2017/10/31/60f2bad8-bde0-11e7-af84-d3e2ee4b2af1\\_story.html?utm\\_term=.1bc10b690a05](https://www.washingtonpost.com/world/south-korea-and-china-move-to-normalize-relations-after-thaad-conflict/2017/10/31/60f2bad8-bde0-11e7-af84-d3e2ee4b2af1_story.html?utm_term=.1bc10b690a05) [Diakses pada 14 Maret 2017].
- Wen, Yi. 2016. *China's Rapid Rise: From Backward Agrarian Society to Industrial Powerhouse in Just 35 Years*. [ONLINE] <https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/april-2016/chinas-rapid-rise-from-backward-agrarian-society-to-industrial-powerhouse-in-just-35-years> [Diakses pada 10 Juni 2019].
- World Bank. 2016. *World Development Indicators*. [ONLINE] <http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators/> [Diakses pada 10 Juni 2019].
- Xingjun, Wang. 2012. *On China's Traditional Culture and Peaceful Development Strategy*. Stockholm-Nacka: Institute for Security and Development Policy.
- Zhao, Suisheng, 2004. *Chinese Foreign Policy. Pragmatism and Strategic Behaviour*. New York: M.E. Sharpe.